



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 1050/DJMT/PW1.1.1/IX/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Daftar
Hal : Pemberitahuan ke III Pelaporan
LHKPN yang Perlu Perbaikan di
Lingkungan Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

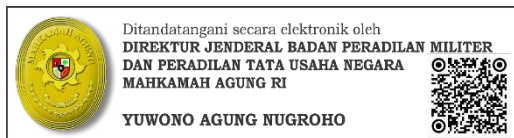
Jakarta, 11 September 2025

Yth. Para Kepala dan Ketua Pengadilan
(Daftar Terlampir)
di tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 3643/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Pemberitahuan ke III Pelaporan LHKPN yang Perlu Perbaikan di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini disampaikan kepada Saudara agar memerintahkan kepada wajib lapor yang berdasarkan hasil verifikasi KPK dinyatakan berstatus **"Perlu Perbaikan"** kembali (daftar terlampir) agar segera melakukan perbaikan pelaporan LHKPN. Kewajiban perbaikan ini telah diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Jika wajib lapor sebagaimana terlampir telah melakukan perbaikan (termasuk wajib lapor yang telah pensiun) agar diinformasikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat elektronik yang dikirimkan pada email informasi.bawas@mahkamahagung.go.id. dan tembusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun melalui tautan: https://s.djmt.id/dokumen_wajib_lapor_LHKPN dengan melampirkan bukti atau data dukung.

Demikian agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI
Nomor : 1050/DJMT/PW1.1.1/IX/2025
Tanggal : 11 September 2025

Daftar Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di
Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

- 1. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
- 3. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan;
- 4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.



Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

YUWONO AGUNG NUGROHO





Lampiran II
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI
Nomor : 1050/DJMT/PW1.1.1/IX/2025
Tanggal : 11 September 2025

Daftar Wajib Laport Pelaporan LHKPN Yang Perlu Perbaikan
di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Data Per 1 September 2025

No	Nama	Jabatan	Satuan Kerja
1.	Mayor Indra Gunawan, S.H., M.H.	Hakim Militer	Pengadilan Militer I - 02 Medan
2.	Ismail Usman, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3.	Saltie Londong, S.H.	Panitera Pengganti	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
4.	Khairunisa, S.Kom., S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram



Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

YUWONO AGUNG NUGROHO



